

Kepentingan Rusia Me-Aneksasi Semenanjung Krimea Tahun 2014

Devindra Ramkas Oktaviano^{1*} (devin.oktav15@gmail.com) & Yuli Fachri.

Abstract

This research describes Russia's motivation on taking Crimea Peninsula by force from Ukraine in March 2014 or internationally called as Crimea Annexation. After Ukraine's Euromaidan Revolution ended in february 2014 with the escape of President Viktor Yanukovich to Russia and the interim government was formed, a new separatist conflict arise in the regions that predominantly Russian speakers and led by the Crimea secession which was followed soon by Russia's annexation. Russia has been violated many international agreements and bring it to the condemnation by international community and western countries were planned to impose sanctions. This case will be analyzed in international system level within the framework of offensive realism and security approach. Under the assumptions of the theories, security dilemma and offensive capabilities lead to the expansion by great powers, mainly territorial expansion. Russia seeking to strengthening political influence and security in the Black Sea Region, where Crimea, Ukraine, and Russia are located. Security dilemma comes from political and military expansion by NATO, European Union, and United States. Annexation of Crimea showed that Russia has returned to a great power and the rivalry between Western countries and Russia actually continues even though cold war has ended more than two decades ago.

Keywords: *Annexation, Black Sea Region, European Union, Territorial Expansion, NATO, Offensive Realism, Russia, Security.*

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang latar belakang Rusia mencaplok wilayah Semenanjung Krimea dari Ukraina pada tahun 2014. Aneksasi Krimea tersebut merefleksikan hubungan diplomatik Rusia-Ukraina yang fluktuatif pasca kemerdekaannya dari Uni Soviet tahun 1991. Kebijakan pemerintah serta dorongan domestik Ukraina yang cenderung memperat hubungan dengan barat terutama dalam hal keamanan dan ekonomi berdampak pada hubungan antagonistik negara tersebut dengan Rusia. Aneksasi Semenanjung Krimea merupakan sebuah episode lanjutan dalam krisis Ukraina – sebuah konflik internal di Ukraina yang kemudian dikenal dengan istilah Revolusi Euromaidan. Penyebab konflik tersebut adalah kebijakan Presiden Viktor Yanukovich yang menyatakan penarikan diri Ukraina dari rencana perjanjian dagang dengan Uni Eropa pada tanggal 21 November 2013. Pada penghujung

^{1*} Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2011

November hingga pertengahan Desember, demonstrasi berlangsung di alun-alun kemerdekaan di Kiev dengan melibatkan hampir satu juta massa yang mengecam keputusan tersebut. Tuntutan demonstran juga meluas hingga isu-isu korupsi dan kebebasan sipil. Revolusi tersebut mereda setelah pemerintahan Viktor Yanukovich akhirnya menandatangani perjanjian bersama dengan para pemimpin oposisi pada tanggal 21 Februari 2014. Beberapa hari setelahnya, diketahui bahwa Viktor Yanukovich telah meninggalkan Ukraina dan pergi meminta perlindungan ke Rusia. Kekosongan kekuasaan kemudian diisi dengan presiden dan perdana menteri sementara sampai pemilu diadakan.

Perubahan komposisi pemerintahan pasca pelarian Viktor Yanukovich ternyata membuka babak baru krisis Ukraina, dimana justru konflik muncul di bagian selatan dan timur Ukraina yang menentang pemerintahan sementara yang dianggap tidak lagi pro-Rusia. Wilayah Krimea menjadi pelopor dalam aksi menentang ini yang dilaksanakan dalam bentuk demonstrasi dan pendudukan gedung-gedung pemerintahan serta beberapa fasilitas lainnya. Rusia kemudian menunjukkan intervensi lebih jauh ke dalam konflik Ukraina dengan mengerahkan militer ke Krimea dan perbatasan Ukraina pada tanggal 01 Maret. Pada tanggal 16 Maret p Krimea mengadakan referendum terkait status Krimea dan kota Sevastopol. Referendum tersebut berakhir dengan 96.7% rakyat Krimea memilih bergabung dengan Federasi Rusia. Dua hari kemudian, tanggal 18 Maret 2014, pemerintah Rusia resmi menandatangani undang-undang yang memasukkan wilayah semenanjung Krimea sebagai subjek federal baru Rusia.²

Aneksasi telah melanggar berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani Rusia.³ Sehari sebelum referendum, Dewan Keamanan telah melakukan pemungutan suara untuk mengesahkan resolusi yang menyatakan bahwa referendum Krimea 16 Maret adalah ilegal, namun resolusi tersebut akhirnya gagal setelah Rusia memveto resolusi tersebut. Kecaman dari komunitas internasional masih berlanjut dimana pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Umum PBB langsung mengeluarkan resolusi tidak mengikat (*non-binding resolution*) terkait ilegalitas referendum Krimea dimana resolusi tersebut disetujui 100 negara, 58 negara menyatakan abstain, dan 11 negara menolak serta

2 "Ukraine crisis: Timeline," BBC News Website, 9 September 2014, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275> [Diakses 12 April 2014]

3 Edward Lucas & Wess Mitchell, Central European Security After Crimea: The Case for Strengthening NATO's Eastern Defenses. *Center for European Policy Analysis*. Washington DC, No.35, 25 Maret 2014. Hal.1

24 negara tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara. Barat dengan tegas menyatakan bahwa tindakan Rusia tersebut adalah ilegal.⁴ Amerika Serikat menyatakan mengutuk keras tindakan Rusia tersebut dan mengancam untuk memberikan sanksi.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka Teori

Penulis menggunakan tingkat analisis sistem internasional yang berfokus pada kawasan laut hitam sebagai lingkup dimana perilaku aktor-aktor yang melatarbelakangi aneksasi tersebut dianalisis. Perspektif Realisme Ofensif dan pendekatan keamanan menawarkan eksplanasi yang memuaskan terkait fenomena ekspansi teritorial seperti aneksasi Krimea. Penggunaan istilah realisme offensif pertama kali dapat ditelusuri dari tulisan Jack Snyder dalam bukunya *Myths of Empire* yang menerangkan adanya dualisme dalam perspektif realisme terkait fenomena ekspansi dan imperium, yaitu Realisme Defensif dan Realisme Ofensif.⁵ Kedua realisme diatas merupakan produk dari perdebatan dalam realisme kontemporer mengenai perbedaan yang fundamental terkait implikasi dari sistem internasional yang anarki.⁶ Realisme Ofensif berasumsi bahwa sistem internasional selalu memberikan dorongan untuk melakukan ekspansi, sementara itu realisme defensif berasumsi bahwa dorongan ekspansi tersebut hanya muncul dalam kondisi tertentu. Setiap negara berusaha memaksimalkan *relative power* karena hanya negara-negara yang paling kuat yang dapat menjamin keberlangsungannya (*survival*).⁷

Pemikiran realisme offensif sebagian besar ditunjang oleh John Mearsheimer melalui **Teori Politik Kekuatan Besar** (*theory of great power politics*) yang dikemukakannya dalam buku yang berjudul *The Tragedy of Great Power Politics*. Mearsheimer mengemukakan lima

4 Rusia mengklaim tindakannya sebagai Aksesi (legal) karena telah melalui proses referendum. Barat menolak mengakui keabsahan referendum sehingga tindakan Rusia dianggap sebagai aneksasi (ilegal). Lihat perspektif hukum internasional tentang aneksasi, aksesi, dan referendum dalam: Christian Marxsen, "The Crimea Crisis – An International Law Perspective" Tersedia di: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2520530 [Diakses 20 Januari 2015]

5 Jack Snyder, *Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition* (New York: Cornell University Press, 1991). Hlm. 12

6 Jeffrey Taliaferro, Security Seeking Under Anarchy: Defensive Realism Revisited, *International Security*, Vol. 25, No. 3, (2000/01) 128-161.

7 John Mearsheimer, "Back to the Future": Instability in Europe After the Cold War", *International Security*, 15, 1, 1990: 12.

asumsi tentang fenomena *struggle for power* yang dilakukan *great power* dalam politik internasional.⁸ Pertama, sistem internasional bersifat anarkis karena ketiadaan otoritas internasional di atas negara. Kedua, *great power* memiliki kapabilitas militer yang bersifat ofensif. Ketiga, negara-negara tidak dapat memastikan tujuan dari negara lain. Setiap negara berasumsi bahwa selalu terdapat kemungkinan setiap negara akan bertindak ofensif dengan memanfaatkan kapabilitas militer dan hubungan antar negara juga dapat berubah dari persahabatan menjadi permusuhan dalam waktu yang singkat. Keempat, sasaran utama kebijakan negara adalah kelangsungan hidup (*survival*) yang diwujudkan dalam bentuk integritas teritorial dan otonomi dalam tatanan politik domestik. Keamanan dalam hal ini ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri. Kelima, *great power* merupakan aktor yang rasional.

Fakta historis menunjukkan bahwa penguasaan teritori merupakan faktor dominan dalam berbagai konflik dan perang.⁹ Mearsheimer mengemukakan bahwa negara pada dasarnya akan memanfaatkan setiap peluang untuk melakukan ekspansi jika mereka telah memiliki kapabilitas yang dibutuhkan (*opportunistic expansion*). Meningkatkan penguasaan wilayah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan *power*. Dalam kaitannya dengan keamanan, realisme ofensif lebih merujuk pada ekspansi teritorial daripada hanya sebatas meningkatkan kekuatan militer (*military procurement*) atau beraliansi. Kebijakan ekspansi tersebut tidak ditujukan untuk hal-hal yang diluar keamanan kecuali tujuan tersebut selaras kepentingan untuk mengejar *power* dan keamanan. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, sistem internasional yang anarki merupakan insentif yang kuat bagi terjadinya ekspansi, termasuk ekspansi teritorial. Dalam kerangka pemikiran realisme ofensif, insentif tersebut adalah **dilema keamanan**.¹⁰ Robert Jervis menjelaskan dilema keamanan merupakan keadaan yang timbul ketika peningkatan keamanan nasional suatu negara berdampak pada

8 John Mearsheimer. *The Tragedy of Great Power Politics*. (New York: W W Norton & Company: 2001) hal.30-32

9 John Vasquez. *The War Puzzle Revisited*. (New York, Cambridge University Press: 2009). Hlm. 140-141.

10 Taylor Fravel menambahkan faktor *lateral pressure* dan *population pressure* sebagai pendorong terjadinya ekspansi teritorial yang dilakukan oleh Tiongkok. Namun, dalam penelitian ini kedua faktor tersebut tidak dapat disertakan karena ada perbedaan yang signifikan antara Tiongkok dengan Rusia. Lihat: Taylor Fravel, "International Relations Theory and China's Rise: Assessing China's Potential for Territorial Expansion," *International Studies Review*, 12, 2010: 505-532.

pengurangan keamanan negara-negara lainnya.¹¹ Konsep **keamanan nasional** tersebut didefinisikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan usaha untuk bebas dari ancaman serta kemampuan suatu negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas independen dan integritas fungsional mereka dalam menghadapi kekuatan pengubah (*forces of change*) yang mereka pandang sebagai musuh.¹² Keamanan merupakan produk kombinasi dua faktor yang tidak dapat dipisahkan: ancaman (*threat*) dan kerentanan (*vulnerabilities*).

Gambaran Umum Semenanjung Krimea

Semenanjung Krimea adalah sebuah daratan di bagian selatan Ukraina dengan luas sekitar 26.100 km² yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh Laut Hitam dan Laut Azov. Pada abad ke-13 Golden Horde Mongol menaklukkan Krimea dan kemudian berturut mengalami Islamisasi pada awal abad-ke-14, dan kemudian berubah menjadi Khanat Krimea yang menjadi bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah pada abad ke-15. Akhir abad ke-18 Krimea berada di bawah penguasaan Tsar Rusia kemudian berlanjut hingga masa Uni Soviet dan pada tahun 1954 menjadi milik Ukraina hingga tahun 2014. Krimea hari ini sebagian besar didominasi etnis Rusia dan dua etnis lainnya yakni Ukraina dan Tatar. Krimea memiliki keunggulan pariwisata dan agrikultur namun sangat bergantung pada Ukraina terkait pasokan listrik, air, dan berbagai produk industri. Terdapat kandungan minyak dan gas yang besar di lepas pantai Krimea dan sebagian belum tereksplorasi.

Hubungan Rusia-Krimea

Kedua entitas politik memiliki hubungan yang kuat dan komprehensif mulai dari isu politik, militer, ekonomi, hingga identitas. Krimea merupakan wilayah dengan persentase etnis Rusia terbesar (58%) dan juga penutur bahasa Rusia terbesar (77%) di Ukraina. Romantisme sejarah dan tendensi politik Krimea yang *Kremlin-oriented* berimplikasi pada kebijakan interventif Rusia terhadap Krimea. Sebagian besar rakyat dan anggota parlemen beserta pejabat eksekutif Krimea menginginkan Rusia sebagai fokus kebijakan luar negeri ketimbang Uni Eropa ataupun Amerika Serikat.¹³ Kota Sevastopol yang berada di barat

11 Robert Jervis, *Cooperation Under Security Dilemma*, *World Politics*, Vol. 30, No. 2, (1978), 167-214.

12 Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century," *International Affairs*, 67, (1991): 432-433.

13 Razumkov Centre. "Specificity of Socio-Cultural and Civil Identity Of The Dominant Ethnic Groups In Crimea." *National Security and Defence*. No. 1 (2008) hal. 9-10

daya Krimea merupakan lokasi pangkalan utama Armada Laut Hitam Rusia. Setidaknya belasan ribu personil dan puluhan kapal perang Rusia berada di Krimea. Penempatan militer Rusia di semenanjung tersebut sering kali menjadi daya tawar baik bagi Rusia dalam diplomasinya terkait beberapa isu terutama mengenai kesepakatan jual-beli dan tarif sewa pipa gas.

Kawasan Laut Hitam dan Kepentingan Rusia

Kawasan Laut Hitam yang didefinisikan sebagai kumpulan enam negara pantai di sekeliling Laut Hitam: Turki, Bulgaria, Rumania, Ukraina, Rusia, dan Georgia serta tiga negara sekitarnya yang sangat berkaitan dengan enam negara di atas: Moldova, Azerbaijan, dan Armenia.¹⁴ Keamanan di kawasan laut hitam begitu kompleks karena mencakup berbagai konteks, baik keamanan militer, politik, energi maupun identitas. Kawasan ini juga berbatasan dengan lima kawasan sekaligus, yaitu: Asia Tengah, Timur Tengah, Balkan, Eropa Timur, dan Kaukasus. Rusia merupakan aktor utama kawasan tersebut dan menjadi salah satu fokus kebijakan luar negeri sejak era Uni Soviet. Kepentingan-kepentingan Rusia di kawasan laut hitam dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Meraih kembali posisi sebagai aktor utama di kawasan Laut Hitam; (2) Mencegah munculnya aktor-aktor atau proyek yang dalam hal energi tidak berada dalam kendali langsung atau tak langsung Rusia; (3) Mencegah munculnya koalisi militer yang anti-Rusia; (4) Mencegah akses negara-negara di kawasan Laut Hitam ke keanggotaan NATO; (5) Memerangi dan menekan aksi separatisme, fundamentalisme, dan terorisme; (6) Menghalangi integrasi negara-negara di kawasan laut hitam ke dalam Uni Eropa.¹⁵

Aneksasi Rusia terhadap Semenanjung Krimea tahun 2014 membuat perhatian internasional untuk kesekian kalinya tertuju pada Armada Laut Hitam Rusia (*Black Sea Fleet*). Armada tersebut merupakan salah satu instrumen kepentingan Rusia di kawasan tersebut. Setidaknya ada empat alasan yang mendasari hal tersebut: Pertama, Krimea merupakan lokasi utama pangkalan Armada Laut Hitam Rusia; kedua, proses aneksasi melibatkan armada tersebut; dan yang paling penting; ketiga,

14 Belum ada definisi universal tentang Kawasan Laut Hitam, yang paling sering digunakan adalah definisi menurut Uni Eropa yang terdiri atas sembilan negara di atas. Lihat: European Parliament, Security and Energy Security in the Black Sea Region, 2010. Tersedia di: http://www.iris-france.org/docs/kfm_docs/docs/observatoire-voisinage-europeen/bl-sea-1009-security-final-published.pdf [Diakses 01 Oktober 2014] hal.6

15 Mitat Çelikpala. Security in The Black Sea Region. (Gütersloh: Commission on the Black Sea, 2010) hal.9

aneksasi akan memberikan kesempatan bagi peningkatan kuantitas dan kualitas yang sangat signifikan pada Armada Laut Hitam Rusia, dan keempat, aneksasi berhasil memberikan Armada Laut Hitam Rusia sebuah tempat yang secara strategis merupakan yang terkuat di kawasan laut hitam.¹⁶

Ekspansi Barat¹⁷ ke Kawasan Laut Hitam

Ekspansi barat dalam segala bidang, terutama dalam hal politik, militer dan ekonomi merupakan ancaman paling utama dalam konteks keamanan regional kawasan laut hitam. Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam NATO dan Uni Eropa atau organisasi lainnya yang merupakan subordinasi dari kedua organisasi tersebut merupakan aktor-aktor yang terlibat dalam ekspansi tersebut. Ekspansi NATO ke laut hitam pada bermula dari kebijakan Amerika Serikat dan sekutunya terutama di Eropa untuk melaksanakan operasi perdamaian dan pemberantasan terorisme di Afghanistan pasca tragedi WTC 11 September 2001. Untuk mendukung operasi tersebut, logistik dibawa melalui penerbangan yang melewati negara-negara yang berada di Eropa Timur, kawasan Laut Hitam, dan Asia Tengah. Khusus untuk kawasan Laut Hitam, Turki, Bulgaria, Rumania, Ukraina, Moldova, Georgia, dan Azerbaijan menunjukkan dukungan mereka terhadap AS dan NATO. Dukungan ini selain diberikan dalam bentuk izin penggunaan wilayah udara juga mencakup pengarahannya bantuan tentara dan penggunaan pangkalan militer.¹⁸

Formalisasi dan legalisasi ekspansi NATO dilakukan dengan pemberian kenggotaan penuh (*full membership*) dan peluncuran beberapa program pra-keanggotaan penuh bagi negara-negara termasuk di kawasan Laut Hitam. Sejak bubarnya Uni Soviet, selusin negara di benua Eropa telah diterima seksesinya kedalam keanggotaan penuh NATO. Perluasan keanggotaan ini dibagi kedalam tiga ronde. Pertama adalah ronde 12 Maret 1999 yang menambahkan Republik Cekoslovakia, Polandia, dan Hungaria sebagai anggota baru NATO.

16 Dmitri Trenin. *The Ukraine Crisis and the Resumption of Great-Power Rivalry*. (Moscow: Carnegie Moscow Center: 2014) Tersedia di: [Diakses 14 Desember 2014] hal.14

17 Lihat definisi "Barat: dalam: James Kurth. *Western Civilization, Our Tradition. The Intercollegiate Review*. Vol.39, No. 1-2, Fall 2003/Spring 2004 Hal.5-13

18 Svante Cornell, Anna Jonsson, Niklas Nilsson, Per Haggström. *The Wider Black Sea Region:*

An Emerging Hub in European Security. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, Washington D.C.: 2006. Tersedia di: http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/30268/ipublicationdocument_singledocument/bddbda5c-9b49-481a-84cc-70173494bd1e/en/Wider_Black_Sea_Region.pdf [Diakses 05 Oktober 2014] hal. 66 - 67

Ronde kedua kemudian memperluas keanggotaan NATO hingga menjadi total 26 negara dengan masuknya Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania, Slovakia dan Slovenia pada tanggal 29 Maret 2004. Ronde terakhir berlangsung pada tanggal 1 April 2009 dimana dua negara Balkan, Kroasia dan Albania dinyatakan tergabung dalam NATO.¹⁹ Ketiga ronde tersebut secara khusus telah menunjukkan langkah konkrit ekspansi NATO ke kawasan Laut Hitam dengan masuknya dua negara pantai Bulgaria dan Rumania terlepas dari Turki yang sudah bergabung sejak tahun 1952. Ancaman dari ekspansi NATO di kawasan laut hitam sudah jelas dimulai dari masuknya Bulgaria dan Rumania ke dalam aliansi militer terkuat di dunia tersebut. Namun yang paling penting adalah status negara-negara lainnya di kawasan Laut Hitam yang saat ini belum bergabung dengan NATO namun memiliki keinginan atau bahkan sudah mencapai tingkat kerjasama multibidang dengan NATO.

Hubungan NATO-Ukraina

Ukraina merupakan negara utama di kawasan laut hitam dimana dua kekuatan Barat-Rusia saling berpacu untuk menanamkan pengaruhnya. Hubungan kedua belah sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Presiden Leonid Kuchma (1994-2005) dan semakin erat selama dibawah pemerintahan presiden Viktor Yuschenko yang pro-Barat. Pada tahun 1991, Ukraina bergabung dengan North Atlantic Cooperation Council. Ukraina kemudian menjadi negara yang pertama kali bergabung dalam program PfP di bulan Februari 1994. Titik tolak hubungan NATO-Ukraina dimulai pada tahun 1997 dalam penyelenggaraan KTT Madrid NATO dan Ukraina menandatangani Charter on a Distinctive Partnership yang menjadi landasan berdirinya Komisi NATO-Ukraina (NUC). Lima tahun kemudian, NUC mengadopsi Rencana Aksi NATO-Ukraina. Pada akhir tahun 2004, Ukraina harus mengalami revolusi pertamanya seperti Georgia yang sudah mengalami setahun sebelumnya. Hasil pemilihan umum presiden tahun 2004 yang memenangkan sosok pro-Rusia Viktor Yanukovich diprotes publik karena terindikasi terdapat kecurangan dan korupsi yang masif dalam pelaksanaannya. Komisi pemilihan Ukraina dengan dipantau oleh pengawas internasional kemudian mengadakan pemilihan ulang yang kemudian dimenangkan oleh Viktor Yuschenko.

Viktor Yuschenko membuka masa pemerintahannya dengan bergabungnya Ukraina dalam Intensified Dialogue pada bulan Oktober 2005. Langkah ekspansi NATO ke Ukraina sempat terganggu dengan

¹⁹ "NATO enlargement" NATO Website, 12 Juni 2014. Tersedia di: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm# [Diakses 13 Februari 2015]

peristiwa tahun 2006 di Krimea. Ukraina-NATO berencana mengadakan latihan bersama namun kapal dagang berbendera Amerika Serikat SS Advantage dengan muatan untuk persiapan latihan bersama tersebut ditolak otoritas pelabuhan Feodosia, Krimea, untuk melaksanakan bongkat muat.²⁰ Pada tahun 2008, negara-negara NATO menyetujui Ukraina untuk nantinya menjadi anggota penuh NATO. Berakhirnya masa Yanukovich setelah revolusi kedua pada akhir 2013 membuka peluang baru bagi kemajuan dalam kerjasama NATO-Ukraina.

Ekspansi Uni Eropa

Sementara itu, ekspansi Uni Eropa ke kawasan Laut Hitam dalam konteks keamanan tradisional tidak mengancam Rusia secara langsung bahkan selama era 90-an Rusia menganggap Uni Eropa sebagai pihak yang dianggap mampu mendukung proses transformasinya pasca bubarnya Uni Soviet. Uni Eropa sedikit lambat melakukan ekspansi ke eropa timur dan laut hitam dibandingkan NATO. Tahun 2004, Siprus, Republik Ceko, Slovakia, Estonia, Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia, dan Slovenia bergabung ke Uni Eropa. Perluasan akhirnya memasuki kawasan Laut Hitam ketika Rumania dan Bulgaria dinyatakan tergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007. Kebijakan ekspansi Uni Eropa tertuang dalam satu kerangka besar kebijakan yang dikenal sebagai European Neighborhood Policy (ENP). Kebijakan ini diluncurkan tahun 2004 dan kini telah menghubungkan Uni Eropa dengan pemerintahan dari enam belas negara di timur dan selatan Eropa, tidak termasuk Federasi Rusia. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah mendukung mitra Uni Eropa dalam hal penegakan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, sosial, dan meningkatkan hubungan antar masyarakat masing-masing pihak. ENP dalam perkembangannya juga menyentuh ranah politik, keamanan, dan perdagangan.

Hubungan Uni Eropa-Ukraina

Langkah politik Uni Eropa untuk membawa Ukraina kedalam pengaruh politiknya terbuka lebar sejak Ukraina mengeluarkan undang-undang tentang dasar-dasar kebijakan dalam dan luar negeri pada tanggal 1 Juli 2010 yang didalamnya mengamanatkan pengintegrasian

20 James Greene. "Russian Responses to NATO and EU Enlargement and Outreach", Chatham House, Juni 2012. Tersedia di: http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0612bp_greenepdf [Diakses 23 Januari 2015] hal.15

dengan sistem politik, ekonomi, dan hukum Eropa untuk selanjutnya memperoleh keanggotaan penuh Uni Eropa. Sebelumnya, pada September 2008, kedua belah pihak sepakat untuk menuangkan rencana kerjasamanya kedalam sebuah Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Ukraina. Kerangka kerjasama yang komprehensif menuju akses Ukraina ke Uni Eropa selanjutnya juga tersusun melalui pengesahan Agenda Asosiasi Uni Eropa-Ukraina oleh Dewan Kerjasama Uni Eropa-Ukraina pada tanggal 24 Juni 2013 di Luxembourg.²¹

Ekspansi Amerika Serikat

Amerika Serikat dengan keadidayaannya kapabilitas politik, militer, dan ekonominya juga memiliki kepentingan untuk menciptakan dan mempertahankan hegemoninya di berbagai kawasan dunia termasuk kawasan Laut Hitam. Amerika Serikat adalah anggota sekaligus kontributor utama NATO, namun terkait ekspansinya politik dan militer ke kawasan tersebut, Amerika Serikat bertindak *one man show* dengan membangun kerjasama bilateral dengan setiap negara, meskipun pada akhirnya Amerika Serikat juga berusaha menjustifikasi ekspansinya dengan melabelinya sebagai bagian dari program NATO dan Uni Eropa. Penulis merumuskan setidaknya ada dua program utama bentukan Amerika Serikat sebagai manifestasi dari ekspansinya ke kawasan laut hitam, yakni: *Joint Task Force East* (Gugus Tugas Gabungan Timur) dan *Ballistic Missile Defense System* (Sistem Pertahanan Peluru Kendali Balistik). Intensitas ekspansi militer Amerika Serikat di Kawasan Laut Hitam meningkat dengan signifikan sejak akhir 2013 Amerika Serikat membangun pusat transit baru di pangkalan militer Mihail Kogalniceanu, Rumania. Pangkalan militer ini menggantikan pangkalan militer Manas di Kirgistan yang berakhir masa operasinya Juli 2014. Pusat transit ini mulai beroperasi penuh pada Februari 2014 dan Amerika Serikat telah menganggarkan hingga 20-an juta dollar untuk pembangunan dan pemeliharaan pusat transit baru tersebut. Kebijakan Amerika Serikat tersebut walaupun untuk sementara dinyatakan hanya diselenggarakan hingga akhir 2015, namun memiliki dampak yang signifikan pada keamanan kawasan laut hitam karena hanya berjarak beberapa ratus kilometer dari pangkalan militer Sevastopol.²² Selain itu, Amerika

21 Lihat: "EU-Ukraine Association Agenda" European External Action Service. Tersedia di: http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/eu_ukr_ass_agenda_24jun2013.pdf [Diakses 06 Januari 2015]

22 "US seeks to boost troops at Black Sea base: Romania", Press TV Website, 1 April 2014. Tersedia di: <http://www.presstv.com/detail/2014/04/01/356825/us-to-boost-troops-in-romania/> [Diakses 28 Januari 2014]

Serikat juga berencana menempatkan beberapa kapal perangnya di Constanta, pangkalan angkatan laut Rumania yang berlokasi tidak jauh dari Mihail Kogalniceanu.

Proses Aneksasi Krimea

Pasca presiden Viktor Yaukovich melarikan diri ke Rusia pada Sabtu 22 Maret 2014, terjadi kekosongan kekuasaan sementara di Ukraina. Rusia memanfaatkan kesempatan ini dengan menganeksasi Semenanjung Krimea. Berselang enam hari kemudian pada tanggal 28 Maret 2014, Rusia resmi mengerahkan militer ke Semenanjung Krimea. Operasi yang berlangsung selama tiga minggu ini berjalan sukses tanpa ada perlawanan yang berarti dari militer Ukraina. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan operasi militer Rusia dengan mudah menguasai Krimea, yakni: pasukan Rusia yang memang sudah berada Krimea (Sevastopol), jarak yang tidak jauh dengan lokasi-lokasi strategis, dan perintah dari Ukraina kepada pasukannya untuk tidak melakukan perlawanan.²³ Dengan demikian, sejak akhir Februari secara *de facto* Krimea berada dibawah kekuasaan Rusia.

Pada tanggal 18 Maret 2014 aneksasi Semenanjung Krimea resmi memasuki tahapan formal pertamanya. Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Krimea, Ketua Parlemen Krimea dan Ketua Dewan Kotamadya Sevastopol menandatangani rancangan undang-undang aneksasi Krimea yang kemudian dikenal sebagai perjanjian aneksasi Krimea.²⁴ Aneksasi Semenanjung Krimea berdampak langsung terhadap perluasan wilayah daratan Rusia. Namun, perluasan wilayah darat ini hampir tidak berarti bagi Rusia karena Krimea berkontribusi kurang dari setengah persen dari luas teritorial Rusia. Signifikansi aneksasi Krimea dalam perspektif teritorial justru berada di wilayah perairan yang berada di sekeliling Semenanjung Krimea tersebut. Posisi geografis Krimea yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh laut berkonsekuensi pada

23 Anton Bebler. Freezing a Conflict: The Russian–Ukrainian Struggle over Crimea. *Israel Journal of Foreign Affairs*. Vol. 8 No.3 (2014) 63-73. Lihat juga: Andrzej Wijk. *Russian military intervention in Crimea*. Centre for Eastern Studies, 05 Maret 2014. Tersedia di: <http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-05/russian-military-intervention-crimea> [Diakses 22 Desember 2015]

24 “Agreement on the accession of the Republic Crimea to the Russian Federation signed” Official site of the President of Russia, 18 Maret 2014. Tersedia di: <http://eng.kremlin.ru/news/6890> [Diakses 12 April 2014] Teks resmi perjanjian dapat dilihat di situs resmi Kepresiden Rusia: “Dogovor mezhdru Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Krym o prinyatii v Rossiyskuyu Federatsiyu Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossiyskoy Federatsii novykh subyektov” *President Rossii*, 18 Maret 2014. Tersedia di: <http://www.kremlin.ru/news/20605> [Diakses 21 Januari 2015].

peningkatan yang sangat besar terhadap luas wilayah maritim Rusia di Laut Hitam dan juga di laut Azov. Rusia mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari kebijakan aneksasi tersebut melalui penguasaan aset militer, baik milik Rusia maupun milik Ukraina yang berada di wilayah Krimea. Rusia memiliki sejumlah besar aset militer di Krimea yang mencakup tentara, alutsista, dan beberapa fasilitas pendukung. Sebagai konsekuensi dari keberadaan aset militer ekstrateritorial tersebut, Rusia harus membayar sejumlah kompensasi dan mendapatkan pembatasan terhadap kapasitas militer yang diizinkan untuk berada di wilayah Krimea tersebut. Namun demikian, setelah kedaulatan Krimea berubah menjadi milik Rusia setelah aneksasi tahun 2014, tidak ada lagi kewajiban yang dibebankan terhadap Rusia terkait berbagai kompensasi dan pembatasan. Dengan tidak berlakunya lagi kedua perjanjian di atas, maka Rusia mendapatkan kesempatan untuk mengalihkan sedikitnya 6 Milyar Dolar per tahun untuk penguatan armada laut hitam Rusia. Selain terbebas dari biaya dan batasan, armada laut hitam Rusia mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas yang signifikan pasca aneksasi tersebut. Penguatan ini berasal dari baik Rusia sendiri maupun dari aset militer Ukraina yang diambil alih. Berdasarkan perkiraan Kementerian Pertahanan Ukraina terdapat peralatan militer dengan total nilai sebesar US\$ 1.7 juta berada di Krimea dan sebagian besar diantaranya telah diambilalih oleh Rusia.²⁵ Jatuhnya Krimea ke tangan Rusia sepenuhnya membuat seluruh Laut Hitam berada dalam lingkup kekuatan militer Rusia. Awal Desember 2014, Rusia telah memindahkan peluru kendali balistik taktis jarak pendek, Iskander ke Krimea untuk menggantikan sistem Tochka yang dipasang sebelumnya. Rudal dengan nama NATO SS-26 Stone ini memiliki jarak tembak hingga 500 km dan memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir.²⁶

Simpulan

Motivasi Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea pada tahun 2014 dapat dijelaskan akibatnya adanya ancaman terhadap pengaruh politik dan keamanan Rusia dari ekspansi politik dan militer barat ke

25 Jason Bush. "Factbox - Costs and benefits from Russia's annexation of Crimea", Reuters, 08 April 2014. Tersedia di: <http://uk.reuters.com/article/2014/04/08/uk-ukraine-crisis-crimea-costs-factbox-idUKBREA370NY20140408> [Diakses 19 Januari 2015]

26 Lihat: "Russian Missiles in Crimea- Kremlin deploys 500km range missiles with nuclear capabilities to Crimea" Ukraine Today, 04 Desember 2014. Tersedia di: https://www.youtube.com/watch?v=w-sg677AfUw&list=UUjX58COleIWwvc0_e9r_oMA [Diakses 04 Maret 2014]

kawasan Laut Hitam. Ekspansi ini dilakukan oleh tiga aktor internasional yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pakta Pertahanan Atlantik Eropa (NATO), Uni Eropa (EU), dan Amerika Serikat. Perluasan keanggotaan ke arah timur Eropa, termasuk ke kawasan Laut Hitam merupakan bentuk ekspansi politik NATO yang otomatis diikuti oleh ekspansi militer. Uni Eropa juga memperluas keanggotaannya hingga ke kawasan Laut Hitam.

Ekspansi ini selanjutnya juga diikuti oleh ekspansi dalam bidang-bidang lainnya seperti ekonomi dan energi. Rusia mempunyai kepentingan yang kompleks di kawasan Laut Hitam. Melalui perluasan wilayah kedaulatan dan pengambilalihan serta penguasaan segala sektor, termasuk militer di Krimea, maka Rusia dapat mengurangi atau mengatasi ancaman-ancaman keamanan tersebut serta memperkuat pengaruh politiknya. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Krimea memiliki keunggulan geografis dan strategis yang menjadikannya sebagai kunci keamanan kawasan laut hitam. Tentunya kebijakan aneksasi ini terlepas dari apakah ini berhasil hanya pada jangka waktu tertentu atau mampu berdampak positif bagi Rusia untuk jangka waktu yang lebih lama. Ringkasnya, interaksi antara Rusia dan barat dalam sistem regional Laut Hitam melahirkan motivasi aneksasi tersebut.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Bebler, A. (2014). Freezing a Conflict: The Russian–Ukrainian Struggle over Crimea. *Israel Journal of Foreign Affairs*, 8(3), 63-73.
- Buzan, B. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century. *International Affairs (Royal Institute Of International Affairs 1944)*, 67(3), 431.
- Fravel, T. (2010). International Relations Theory and China's Rise: Assessing China's Potential for Territorial Expansion. *International Studies Review*, 12(4), 505-532.
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics*, 30(02), 167-214.
- Kurth, J. (2003). Western Civilization, Our Tradition. *The Intercollegiate Review*, 39(1-2), 5-13.
- Mearsheimer, J. (1990). Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War. *International Security*, 15(1), 5.
- Specificity of Socio-Cultural and Civil Identity Of The Dominant Ethnic Groups In Crimea. (2008). *National Security & Defence*, (10), 3-22. Diakses dari http://razumkov.org.ua/eng/files/category_journal/NSD104_eng.pdf
- Taliaferro, J. (2001). Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited. *International Security*, 25(3), 128-161.

Buku

- Mearsheimer, J. (2001). *The tragedy of Great Power politics*. New York: Norton.
- Snyder, J. (1991). *Myths of empire*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- Vasquez, J. (2009). *The War Puzzle Revisited*. New York: Cambridge University Press.

Publikasi & Laporan

- Çelikpala, M. (2010). *Security in The Black Sea Region*. Gütersloh: Commission on the Black Sea. Diakses dari http://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Security_in_the_Black_Sea_Region.pdf
- Cornell, S., Jonsson, A., Nilsson, N., & Häggström, P. (2006). *The Wider Black Sea Region: An Emerging Hub in European Security* (1st

ed.). Central Asia-Caucasus Institute – Silk Road Studies Program. Diakses dari http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/30268/ipublicationdocument_singledocument/bddbda5c-9b49-481a-84cc-70173494bd1e/en/Wider_Black_Sea_Region.pdf

European External Action Service, . *EU-Ukraine Association Agenda*. Diakses 06 Januari 2015, dari http://eeas.europa.eu/ukraine/docs/eu_ukr_ass_agenda_24jun2013.pdf

European Parliament,. (2010). *Security and Energy Security in the Black Sea Region*. Brussels: Directorate-General for External Policies of the Union.

Greene, J. (2012). *Russian Responses to NATO and EU Enlargement and Outreach* (1st ed.). Chatham House. Retrieved from http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0612bp_greene.pdf

Lucas, E., & Mitchell, A. (2014). *Central European Security After Crimea: The Case for Strengthening NATO's Eastern Defenses*. Center for European Policy Analysis. Diakses dari <http://www.cepa.org/sites/default/files/The%20Case%20for%20Strengthening%20NATOs%20Eastern%20Defenses-%20%282%29.pdf>

Trenin, D. (2014). *The Ukraine Crisis and the Resumption of Great Power Rivalry* (1st ed.). Moscow: Carnegie Moscow Center. Diakses dari http://carnegieendowment.org/files/ukraine_great_power_rivalry2014.pdf

Halaman Web

BBC News,. (2014). Ukraine crisis: Timeline. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>

Bush, J. (2014). Factbox - Costs and benefits from Russia's annexation of Crimea. *Reuters*. Diakses dari <http://uk.reuters.com/article/2014/04/08/uk-ukraine-crisis-crimea-costs-factbox-idUKBREA370NY20140408>

NATO,. (2014). *NATO Enlargement*. Diakses 13 Februari 2015, dari http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49212.htm#

President of Russia,. (2014). *Agreement on the accession of the Republic Crimea to the Russian Federation signed*. Diakses 12 April 2014, dari <http://eng.kremlin.ru/news/6890>

President Rossii,. (2014). *Dogovor mezhdu Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Krym o prinyatii v Rossiyskuyu Federatsiyu Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossiyskoy Federatsii novykh*

subyektiv” Diakses 21 Januari 2015, dari <http://www.kremlin.ru/news/20605>.

Press TV,. (2014). *US to boost troops in Romania*’. Diakses 28 Januari 2015, dari <http://www.presstv.com/detail/2014/04/01/356825/us-to-boost-troops-in-romania/>

Video

Ukraine Today,. (2014). *Russian Missiles in Crimea - Kremlin deploys 500km range missiles with nuclear capabilities to Crimea*. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=wsg677AfUw&list=UUjX58COleIWwvc0_e9r_oMA